



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FREDIK SUHARTO
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK PEMERINTAH
3. NHK : 200101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 265.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/200 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/100 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, WARISAN Rp. 115.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 48.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO X1H02N35M1 / SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX 2 DP R AT / SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 47.322.904

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 377.872.904

III. HUTANG Rp. 210.924.993

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 166.947.911

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.